



## REALISASI APBD SEBAGAI STIMULUS PERTUMBUHAN EKONOMI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Ajeng Taufina Ramadhanti <sup>1)</sup>; Masruri Muchtar <sup>2)</sup>; Pardomuan Robinson Sihombing <sup>3)</sup>

<sup>1)</sup> [ajeng\\_4122230006@pknstan.ac.id](mailto:ajeng_4122230006@pknstan.ac.id), Politeknik Keuangan Negara STAN

<sup>2)</sup> [masruri.m@pknstan.ac.id](mailto:masruri.m@pknstan.ac.id), Politeknik Keuangan Negara STAN

<sup>3)</sup> [robinson@bps.go.id](mailto:robinson@bps.go.id), Badan Pusat Statistik

### Abstract:

The local government budget (APBD) is pivotal for stimulating the economy. This study aims to ascertain the influence of various components within the APBD, namely revenue sharing funds (DBH), general allocation fund (DAU), special allocation fund (DAK), regional government equity participation, social assistance expenditure, personnel expenditure, and goods and services expenditure on economic growth, with gross regional domestic product (PDRB) serving as the growth indicator. The research encompasses all regencies/cities in the Province of South Kalimantan, utilizing data from 2017 to 2022. The testing method employed in this research is panel data regression with the Panel Corrected Standard Errors (PCREs) model. The findings indicate that DBH, DAU, DAK, regional government equity participation, social assistance expenditure, personnel expenditure, and goods and services expenditure collectively impact the economic growth of regencies/cities in South Kalimantan. Specifically, DBH, DAU, and goods and services expenditure demonstrate a significant positive correlation with PDRB, exerting a tangible influence on economic growth. Conversely, regional government equity participation, social assistance expenditure, and personnel expenditure do not significantly influence South Kalimantan's economic growth. Social assistance expenditure negatively impacts economic growth, while the DAK variable displays a negative relationship with economic growth. It is hoped that local governments will enhance APBD management to ensure more efficient and targeted realization.

**Keywords:** Economic Growth, Regional Economic, Regional Gross Domestic Product, The Local Government Budget

### Abstrak

Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) merupakan salah satu instrument yang dapat digunakan untuk menggerakkan perekonomian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh beberapa komponen dalam APBD, yaitu dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), penyertaan modal pemerintah daerah, belanja bantuan sosial, belanja pegawai, serta belanja barang dan jasa dalam pertumbuhan ekonomi dengan produk domestik regional bruto (PDRB) sebagai indikator pertumbuhan. Studi dilakukan pada seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan dengan data kurun waktu 2017 sampai dengan 2022. Metode pengujian yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi data panel dengan model *Panel Corrected Standard Errors* (PCREs). Hasil penelitian menunjukkan bahwa DBH, DAU, DAK, penyertaan modal pemerintah daerah, belanja bantuan sosial, belanja pegawai, serta belanja barang dan jasa secara simultan memengaruhi pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Kalimantan Selatan. Secara parsial, DBH, DAU, dan belanja barang dan jasa menunjukkan korelasi positif yang signifikan dengan PDRB serta berpengaruh secara nyata terhadap pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, penyertaan modal pemerintah daerah, belanja bantuan sosial, dan belanja pegawai tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan. Belanja bantuan sosial menunjukkan dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, sementara itu, variabel DAK menunjukkan hubungan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Diharapkan bagi pemerintah daerah untuk melakukan peningkatan pengelolaan APBD sehingga realisasi lebih efisien dan tepat sasaran.

**Kata Kunci:** Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Ekonomi Regional, Pertumbuhan Ekonomi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

### PENDAHULUAN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun oleh setiap pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Dalam dokumen APBD telah diproyeksikan besaran pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah dalam satu periode anggaran. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, struktur APBD terdiri dari: 1) Pendapatan Daerah yang berisi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer (DBH, DAU, DAK), dan Lain-Lain



Pendapatan Daerah yang Sah; 2) Belanja Daerah yang terdiri dari Belanja Operasional, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer; 3) Pembiayaan Daerah yang terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai proses berkembangnya *output* per kapita yang menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu dalam jangka panjang. Dalam pertumbuhan ekonomi terdapat dua hal yang menjadi perhatian, yaitu *output* total yang dapat dilihat dari pendapatan domestik bruto (PDB) dan jumlah penduduk (Chalid, n.d.). Pertumbuhan PDB merupakan salah satu indikator yang menggambarkan keadaan perekonomian suatu wilayah yang pada level regional disebut dengan pendapatan domestik regional bruto (PDRB). Menurut Ibid dalam Buana et.al., 2018, terdapat 2 konsep pertumbuhan ekonomi, yaitu: 1) Kenaikan pendapatan riil/ *output* riil; 2) Kenaikan *output* per kapita. Ekonomi dikatakan tumbuh apabila *output* riil dan *output* riil per kapita menunjukkan perubahan positif.

Transfer ke Daerah (TKD) merupakan dana yang dikelola oleh Pemerintah Daerah yang bersumber dari Pemerintah Pusat yang berasal Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN). Pemberian dana ini kepada daerah bertujuan untuk mendanai urusan pemerintahan dalam kewenangan pemerintah daerah (Indonesia, 2023). Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023, terdapat beberapa jenis TKD yang disalurkan ke daerah, yaitu, Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) terdiri dari fisik dan non fisik, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan DIY, dan Dana Desa. Indonesia telah menerapkan desentralisasi fiskal sejak tahun 2004 dan dengan adanya desentralisasi fiskal ini Pemerintah Daerah berhak untuk mengatur sendiri wilayah yang menjadi kewenangannya. Menurut Oates (1999) dalam Anggita & Sari (2021), implementasi desentralisasi fiskal dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi karena pemerintah di daerah lebih mengerti akan keperluan dan keterbatasan di daerahnya sendiri sehingga perencanaan pengeluaran akan lebih terarah dan lebih efisien.

Stimulus pertumbuhan ekonomi regional juga dapat diberikan melalui pengeluaran pemerintah daerah melalui belanja daerah. Dorongan dari pemerintah pusat bagi pemerintah daerah untuk mendorong belanja barang dan jasa dimaksudkan agar perekonomian di daerah bergerak dan tidak terdampak secara signifikan oleh krisis yang melanda dunia, terutama saat pandemi Covid-19 lalu. Selain itu, pemerintah juga memberikan insentif dalam bentuk belanja bantuan sosial bagi masyarakat yang salah satunya bertujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat yang bermuara pada pertumbuhan ekonomi. Seperti halnya pemerintah pusat, pemerintah daerah juga perlu melakukan pembiayaan untuk menutupi defisit anggaran dan/atau berinvestasi untuk memperoleh manfaat di masa depan. Salah satu bentuk pembiayaan APBD adalah penyertaan modal pemerintah daerah kepada badan usaha daerah atau swasta yang nantinya akan memberikan manfaat imbal jasa bagi Pemerintah Daerah.

Fadilla et al., (2022) menemukan DAU berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap PDRB dan DAK berpengaruh positif terhadap PDRB di kawasan timur Indonesia. Anggita & Sari, (2021) menemukan dana perimbangan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Dinarjito & Dharmazi, (2020) menyimpulkan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional di Kalimantan Timur. Buana et.al., (2018) mengemukakan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa. Penelitian oleh Pangestu (2018) menyimpulkan bahwa belanja pegawai berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi sedangkan belanja barang dan jasa berpengaruh negatif pada pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan. Sinto et.al., (2023) menyebutkan bahwa penyertaan modal pemerintah daerah berpengaruh positif pada peningkatan ekonomi di Kalimantan Tengah.



Studi yang mendalami faktor-faktor penentu pertumbuhan ekonomi sudah banyak dilakukan. Namun, penelitian yang mengangkat isu hubungan APBD dengan pertumbuhan ekonomi ini di Provinsi Kalimantan Selatan. Peran APBD yang dinilai cukup krusial bagi perekonomian regional ini merupakan hal yang cukup menarik untuk dianalisis. Pada penelitian ini digunakan data terbaru dalam kurun waktu 2017 hingga 2022 dan menambahkan variabel belanja bantuan sosial sebagai variabel dependen yang akan dianalisis.

Penelitian ini dimaksudkan untuk menilai peran komponen APBD, yaitu DBH, DAU, DAK, penyertaan modal pemerintah daerah, belanja bantuan sosial, belanja pegawai, serta belanja barang dan jasa sebagai stimulus perekonomian regional dengan melihat pengaruh komponen-komponen tersebut terhadap PDRB di Provinsi Kalimantan Selatan. Penelitian dilakukan terhadap 13 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan pada periode tahun anggaran 2017 sampai dengan 2022.

### **KAJIAN PUSTAKA**

Beberapa peneliti telah melakukan pengujian terkait pengaruh dana alokasi desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi. Amelia & Ekobelawati (2018) melakukan terkait efektivitas dana transfer pusat terhadap perekonomian di Kalimantan Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DAU berpengaruh positif terhadap PDRB, DBH berpengaruh negatif pada PDRB, dan DAK memiliki hubungan positif tetapi tidak signifikan dalam memengaruhi PDRB.

Dalam penelitian lain yang dilakukan oleh Fadilla et.al., (2022) tentang pengaruh desentralisasi fiskal dan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi di timur Indonesia mengemukakan bahwa DAU berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap PDRB dan DAK berpengaruh positif signifikan terhadap PDRB di kawasan timur Indonesia. Menurut hasil penelitian Anggita & Sari, (2021) dengan topik yang sama di wilayah Provinsi Jawa Tengah, dana perimbangan yang diberikan pemerintah kepada daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi yang diukur melalui PDRB. Dinarjito & Dharmazi, (2020) dalam penelitiannya terkait pertumbuhan ekonomi regional di Kalimantan Timur memperoleh hasil bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Buana et.al., (2018), dalam penelitiannya terkait pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa menyebutkan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian yang dilakukan oleh Pangestu (2018) menunjukkan hasil bahwa belanja pegawai berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi sedangkan belanja barang dan jasa berpengaruh negatif dan tidak signifikan pada pertumbuhan ekonomi. Menurut Deswanto et.al., (2017) yang melakukan penelitian terkait di Kalimantan Barat, memperoleh hasil bahwa belanja pegawai berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Selain itu, penelitiannya juga menunjukkan bahwa belanja barang dan jasa berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi serta belanja bantuan sosial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kawasan Kalimantan Barat. Penelitian yang dilakukan oleh Sinto et.al., (2023) menyebutkan bahwa penyertaan modal pemerintah daerah berpengaruh positif pada peningkatan ekonomi di Kalimantan Tengah.

**Tabel 1 Penelitian Terdahulu**

<b>No.</b>	<b>Peneliti</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
------------	-----------------	-------------------------	-------------------------



1.	Amelia & Ekobelawati (2018)	Efektivitas Transfer Pusat Terhadap Perekonomian Kalimantan Barat	- DAU signifikan, positif, - DBH signifikan, negatif, - DAK tidak signifikan, negatif
2.	Fadilla et al (2022)	Desentralisasi Fiskal dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kawasan Timur Indonesia	- DAU tidak signifikan, positif, - DAK signifikan, positif
3.	Anggita & Sari (2021)	Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Investasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2019	Dana perimbangan signifikan, positif
4.	Dinarjito & Dharmazi (2020)	Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Investasi, dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional di Provinsi Kalimantan Timur	Desentralisasi fiskal tidak signifikan, negatif
5.	Buana et al. (2018)	Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Investasi Pemerintah, Investasi Swasta dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Pulau Jawa Tahun 2011 - 2015	Pengeluaran pemerintah signifikan, positif
6.	Pangestu (2018)	Pengaruh Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal, Belanja Pegawai dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Kalimantan Selatan	- Belanja pegawai signifikan - Belanja barang dan jasa tidak signifikan, negatif
7.	Deswanto et al. (2017)	Pengaruh Belanja Daerah Berdasarkan Klasifikasi Ekonomi terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010 - 2015	- Belanja pegawai signifikan, positif - Belanja barang dan jasa tidak signifikan, negatif - Belanja bantuan sosial signifikan, positif
8.	Sinto et al. (2023)	Analisis Pengaruh Belanja Langsung, Belanja Tidak Langsung dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi	- Penyertaan Modal berpengaruh positif

Sumber: Studi Literatur Penulis (2023)



## METODE

Penelitian dilaksanakan dengan menguji data sekunder yang terdiri dari 13 kabupaten dan kota di lingkup wilayah Provinsi Kalimantan Selatan pada periode 2017 sampai dengan 2022. Data yang akan digunakan dalam penelitian diambil dari data publikasi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPk) Kementerian Keuangan dan Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia. Variabel dependen yang digunakan adalah PDRB menurut kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Selatan, sedangkan untuk variabel independen yang digunakan adalah realisasi DBH, DAU, DAK, belanja bantuan sosial, belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menilai apakah variabel independen (bebas) memengaruhi variabel dependen (terikat) secara kuantitatif. Objek populasi yang digunakan adalah seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu:

**Tabel 2 Daftar Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan**

No.	Kabupaten/Kota
1	Kabupaten Balangan
2	Kabupaten Banjar
3	Kota Banjarbaru
4	Kota Banjarmasin
5	Kabupaten Barito Kuala
6	Kabupaten Hulu Sungai Selatan
7	Kabupaten Hulu Sungai Tengah
8	Kabupaten Hulu Sungai Utara
9	Kabupaten Kotabaru
10	Kabupaten Tabalong
11	Kabupaten Tanah Bumbu
12	Kabupaten Tanah Laut
13	Kabupaten Tapin

Sumber: (BPS Indonesia, 2018)

Metode analisis yang digunakan adalah analisis linier berganda data panel yang merupakan penggabungan data *cross section* dan data *time series*. Analisis dilakukan untuk mengetahui pengaruh realisasi DBH, DAU, DAK, belanja bantuan sosial, belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah terhadap PDRB kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan sebagai media pengukuran pertumbuhan ekonomi regional. Model regresi yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 DBH + \beta_2 DAU + \beta_3 DAK + \beta_4 PM + \beta_5 BBS + \beta_6 BP + \beta_7 BBJ + \varepsilon \dots$$

Keterangan notasi persamaan di atas:

Y : PDRB Kab/Kota (dalam miliar rupiah)

$\alpha$  : Konstanta

$\beta_1$  : Koefisien Regresi Dana Bagi Hasil (dalam miliar rupiah)

$\beta_2$  : Koefisien Regresi Dana Alokasi Umum (dalam miliar rupiah)

$\beta_3$  : Koefisien Regresi Dana Alokasi Khusus (dalam miliar rupiah)

$\beta_4$  : Koefisien Regresi Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (dalam miliar rupiah)

$\beta_5$  : Koefisien Regresi Belanja Bantuan Sosial (dalam miliar rupiah)

$\beta_6$  : Koefisien Regresi Belanja Pegawai (dalam miliar rupiah)

$\beta_7$  : Koefisien Regresi Belanja Barang dan Jasa (dalam miliar rupiah)

$\varepsilon$  : Residual/Error-term.



## HASIL DAN PEMBAHASAN

Tahap awal penelitian dilaksanakan dengan melakukan analisis statistik deskriptif terhadap variabel-variabel yang digunakan. Statistik deskriptif bertujuan untuk menjelaskan karakteristik sekumpulan data tanpa generalisasi (Ruwah Ibnatur Husnul et.al., 2020). Tabel berikut menunjukkan hasil analisis statistik deskriptif berupa nilai minimum dan maksimum, rata-rata, serta standar deviasi atas variabel dalam penelitian ini.

**Tabel 3 Hasil Analisis Statistik Deskriptif**

Variabel	N	Rata-Rata	Std. Deviasi	Minimum	Maksimum
<b>PDRB</b>	78	10164,98	5625,032	2977,89	23966,97
<b>DBH</b>	78	371,8853	314,1275	97,6089	1682,833
<b>DAU</b>	78	515,386	97,89216	346,5271	756,873
<b>DAK</b>	78	183,0179	46,25569	107,1401	312,7422
<b>Penyertaan Modal</b>	78	6,584865	9,403684	0	50
<b>Belanja Bansos</b>	78	14,38516	32,69941	0,2666	225,7824
<b>Belanja Pegawai</b>	78	488,1261	97,01982	321,4948	741,2147
<b>Belanja Barang Jasa</b>	78	377,0384	95,28354	184,5003	627,35999

Sumber: Hasil Olahan Penulis (2023)

Rata-rata nilai PDRB di Kalimantan Selatan adalah Rp10.164,98 miliar. PDRB tertinggi berada pada Kota Banjarmasin di tahun 2022 sebesar Rp2977,89 miliar sedangkan PDRB terendah tahun 2022 berada di Kabupaten Hulu Sungai Utara senilai Rp3549,11 miliar. Realisasi DBH di Kalimantan Selatan memiliki rata-rata senilai Rp371,88 miliar dengan realisasi terendah adalah sebesar Rp97,60 miliar pada Kabupaten Hulu Sungai Utara di tahun 2017 dan tertinggi senilai Rp1682,83 miliar pada Kabupaten Balangan di tahun 2022. DAU yang direalisasikan oleh kabupaten/kota di Kalimantan Selatan memiliki rata-rata sebesar Rp515,38 miliar. Realisasi DAU tertinggi senilai Rp756,873 miliar oleh Kabupaten Banjar di tahun 2019 sedangkan realisasi terendah berada pada Kabupaten Balangan senilai Rp346,52 miliar pada tahun 2022. Rata-rata realisasi DAU di Kalimantan Selatan adalah Rp183,017 miliar dengan realisasi tertinggi senilai Rp312,74 miliar pada Kabupaten Banjar di tahun 2022 sedangkan realisasi terendah terjadi pada Kabupaten Balangan di tahun 2018 senilai Rp107,14 miliar.

Rata-rata realisasi belanja bantuan sosial di Kalimantan Selatan adalah sebesar Rp14,38 miliar dengan realisasi tertinggi sebesar Rp225,78 miliar pada Kabupaten Hulu Sungai Utara di tahun 2017. Belanja pegawai yang disalurkan di Kalimantan Selatan memiliki rata-rata senilai Rp488,12 miliar dengan realisasi tertinggi oleh Kabupaten Banjar pada tahun 2021. Realisasi belanja barang dan jasa dengan rata-rata senilai Rp377,03 miliar dengan realisasi tertinggi oleh Kabupaten Tanah Bumbu pada tahun 2021 senilai Rp627,35 miliar. Penyertaan modal pemerintah daerah di Kalimantan Selatan tertinggi berada pada Kabupaten Balangan di tahun 2022 dengan rata-rata senilai Rp50 miliar.

Analisis regresi untuk pengujian pemilihan model data panel yang paling tepat untuk data yang digunakan. Pemilihan model dilakukan dengan melakukan perbandingan antara *Pooled Least Model* (PLS), *Fixed Effect Model* (FEM), dan *Random Effect Model* (REM). Uji Chow dilakukan untuk memilih antara PLS dengan FEM. Uji *Lagrange Multiplier* (LM) dilakukan untuk memilih antara PLS dengan REM. Dan untuk memilih antara FEM dan REM digunakan *Hausman Test* (Zulfikar, 2019). Dari pengujian yang dilakukan, model yang paling tepat untuk menganalisis data penelitian ini adalah FEM. Hasil pengujian regresi pemilihan model ditunjukkan pada Tabel 4.



Tabel 4 Hasil Pengujian Regresi Pemilihan Model

Perbandingan Model	Metode Pengujian	Nilai Prob>F	Model Terpilih
PLS dan FE	Chow Test	0,0000	FE
PLS dan RE	LM Test	0,0000	RE
FE dan RE	Hausman Test	0,0000	FE

Sumber: Hasil Olahan Penulis (2023)

Pengujian asumsi klasik atas data yang digunakan juga dilakukan dalam penelitian ini untuk mengetahui apakah data yang digunakan melanggar asumsi klasik. Menurut (Allysa Sabrina et.al., 2023), uji asumsi klasik perlu dilakukan untuk menghasilkan analisis yang bersifat *Best, Linear, Unbiased, and Estimator* (BLUE). Tabel 4 di bawah menunjukkan hasil pengujian asumsi klasik pada *Ordinary Least Square* (OLS). Penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi sebesar 5% atau  $\alpha = 0,05$ .

Tabel 5 Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi Klasik	Metode	Nilai Uji	Hasil
Normalitas	Skewness Kurtosi	0,7697	Normal
Multikolinearitas	Variance Inflation Factor	1,69	Multikolinear
Heterokedastisitas	Breusch-Pagan Test	0,0281	Heterokedastis
Autokorelasi	Woolridge Test	0,0000	Autokorelasi

Sumber: Hasil Olahan Penulis (2023)

Model regresi yang dinyatakan lulus dari uji asumsi klasik apabila nilai dari hasil pengujian *Skewness Kurtosi*, *Breusch-Pagan Test*, dan *Woolridge Test* melebihi signifikansi penelitian yang digunakan, dalam hal ini  $\alpha = 0,05$ , serta nilai hasil uji *Variance Inflation Factor* (VIF) kurang dari 10 (Sihombing, 2021b).

Berdasarkan hasil uji asumsi klasik pada Tabel 5, diperoleh hasil bahwa data yang digunakan terdistribusi normal dan terbebas dari gejala multikolinearitas dengan nilai hasil probabilitas  $>0,05$  dan VIF kurang dari 10. Tetapi hasil *Breusch-Pagan Test* menunjukkan bahwa data yang digunakan memiliki gejala heterokedastisitas dengan hasil probabilitas  $<0,05$ , yaitu sebesar 0,028. Hasil uji autokorelasi dengan *Woolridge Test* juga menunjukkan bahwa probabilitas  $<0,05$ , yaitu sebesar 0,00 sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan memiliki gejala heterokedastisitas dan autokorelasi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut digunakan metode estimasi *Panel Corrected Standard Errors* (PCSEs) yang bertujuan untuk mentransformasi data menjadi data normal yang terbebas dari gejala autokorelasi dan heterokedastisitas (Sihombing, 2021). Hasil regresi linear setelah ditransformasikan dengan metode estimasi PCSEs ditunjukkan pada Tabel 6.

Tabel 6 Hasil Regresi Data Panel PCSEs

Variabel	Koefisien	z	Prob> z
Cons	-16266,42	-3,82	0,000
DBH	5,755078	2,49	0,013
DAU	43,05242	5,07	0,000
DAK	-33,91606	-2,31	0,021
Penyertaan Modal	69,51593	1,27	0,204
Belanja Bantuan Sosial	-12,25768	-1,42	0,155
Belanja Pegawai	0,2107896	0,04	0,970
Belanja Barang Jasa	21,02038	2,84	0,004
R <sup>2</sup>			0,5451
Prob>chi2			0,0000

Sumber: Hasil Olahan Penulis (2023)



Berdasarkan hasil regresi data panel menggunakan model estimasi PCSEs di atas, diperoleh nilai *chi-square* pada  $\text{Prob} > \chi^2$  lebih kecil dari  $\alpha=0,05$ , yaitu 0,0000. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel dependen, yaitu PDRB kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Selatan secara simultan dipengaruhi oleh variabel independen yang terdiri dari DBH, DAU, DAK, penyertaan modal pemerintah daerah, belanja bantuan sosial, belanja pegawai, serta belanja barang dan jasa. Hasil pengujian *Goodness of Fit* (GOF) menunjukkan nilai *R-squared* ( $R^2$ ) sebesar 0,5451. Hal tersebut menyatakan bahwa variabel-variabel independen (DBH, DAU, DAK, penyertaan modal pemerintah daerah, belanja bantuan sosial, belanja pegawai, belanja barang dan jasa) memengaruhi variabel dependen (PDRB kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Selatan) sebesar 54,51% sedangkan 45,49% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian.

Dari hasil regresi di atas, diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$Y_{it} = -16266,42 + 5,75DBH + 43,05DAU - 33,91DAK + 69,51PM - 12,25BBS + 0,21BP + 21,02BBJ$$

Hasil pengujian signifikansi variabel independen dan variabel dependen dapat dilihat di Tabel 6 pada kolom  $\text{Prob} > |z|$ . Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa hasil uji parsial DBH menunjukkan bahwa DBH memiliki pengaruh signifikan terhadap PDRB. Hal ini berbeda dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Amelia & Ekobelawati (2018) yang menyatakan bahwa DBH berpengaruh signifikan terhadap PDRB tetapi dalam penelitian tersebut membuktikan hubungan berlawanan arah antara DBH dengan PDRB. Hasil uji parsial dalam penelitian ini menunjukkan hubungan searah atau positif antara DBH dengan PDRB. Hasil uji DAU menunjukkan bahwa DAU memiliki pengaruh signifikan dan berkorelasi positif terhadap PDRB. Hal tersebut memperkuat penelitian Amelia & Ekobelawati (2018) yang menyatakan bahwa DAU memengaruhi PDRB secara signifikan dengan korelasi positif. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Fadilla et.al., (2022) yang menyatakan bahwa DAU berkorelasi positif dengan PDRB tetapi tidak secara signifikan memengaruhi besaran PDRB.

Pengujian parsial DAK terhadap PDRB menunjukkan hasil bahwa DAK memiliki hubungan berlawanan arah dengan PDRB tetapi dapat memengaruhi PDRB secara signifikan. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian terdahulu oleh Amelia & Ekobelawati (2018) yang menyatakan bahwa DAU tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap PDRB tetapi memiliki korelasi negatif atau berlawanan arah dengan PDRB. Hasil uji tersebut juga berbeda dengan hasil penelitian Fadilla et.al., (2022) dengan hasil bahwa DAK secara signifikan berpengaruh pada PDRB dan berhubungan positif atau searah dengan PDRB.

Dari hasil uji variabel-variabel yang termasuk dalam dana perimbangan atau kewenangan desentralisasi fiskal, dapat dikatakan bahwa hasil uji parsial atas variabel tersebut berbeda dengan penelitian Anggita & Sari (2021) dimana hasil yang diperoleh adalah dana perimbangan memengaruhi PDRB secara signifikan dan berkorelasi positif serta penelitian oleh Dinarjito & Dharmazi (2020) yang menyatakan bahwa dana desentralisasi fiskal memiliki hubungan negatif dan tidak secara signifikan memengaruhi PDRB. Penelitian ini menunjukkan bahwa beberapa komponen dana transfer ke daerah memiliki kontribusi positif dan signifikan bagi pertumbuhan ekonomi regional.

Pengujian parsial atas variabel belanja bantuan sosial menunjukkan bahwa belanja bantuan sosial memiliki korelasi berlawanan arah dan tidak secara signifikan berpengaruh terhadap PDRB. Hal ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Deswantoro et.al., (2017) yang menyatakan bahwa belanja bantuan sosial berkorelasi positif dan secara signifikan memengaruhi PDRB. Penelitian oleh Pangestu (2018) dan Deswantoro et.al., (2017) menyatakan bahwa belanja pegawai secara signifikan berpengaruh terhadap PDRB dan



berkorelasi positif. Berbeda dengan penelitian tersebut, hasil pengujian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa belanja pegawai tidak secara signifikan memengaruhi PDRB.

Penelitian yang dilakukan oleh Pangestu (2018) dan Deswanto et.al., (2017) menyatakan bahwa belanja barang dan jasa memiliki korelasi negatif, yaitu berlawanan arah dengan PDRB dan tidak signifikan memengaruhi PDRB. Hal tersebut berbeda dengan hasil pengujian parsial atas variabel belanja barang dan jasa yang menunjukkan bahwa belanja barang dan jasa secara signifikan memengaruhi PDRB dan menunjukkan korelasi positif. Dari hasil pengujian di atas dapat dikatakan bahwa hasil pengujian variabel belanja atau pengeluaran pemerintah sejalan dengan hasil penelitian Buana et.al., (2018) yang menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah daerah berkorelasi positif dan berpengaruh secara signifikan terhadap PDRB meskipun beberapa komponen belanja pemerintah daerah berkontribusi negatif dan tidak secara signifikan memengaruhi pertumbuhan ekonomi regional.

Hasil uji parsial variabel penyertaan modal pemerintah daerah menunjukkan bahwa investasi penyertaan modal yang dilakukan pemerintah daerah kab/kota di Provinsi Kalimantan Selatan memiliki hubungan positif tetapi tidak secara signifikan memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi regional yang diukur melalui PDRB.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa DBH, DAU, DAK, penyertaan modal pemerintah daerah, belanja bantuan sosial, belanja pegawai, serta belanja barang dan jasa secara simultan memengaruhi pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Kalimantan Selatan. Secara parsial, tingkat signifikansi pengaruh masing-masing variabel menunjukkan hasil yang beragam. Variabel DBH, DAU, serta belanja barang dan jasa berkorelasi positif terhadap PDRB dan berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan beberapa variabel seperti penyertaan modal pemerintah daerah, belanja bantuan sosial, dan belanja pegawai tidak secara signifikan memengaruhi pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan. Pada variabel belanja bantuan sosial berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi yang berbanding terbalik dengan salah satu tujuan pemberian bantuan sosial, yaitu peningkatan perekonomian masyarakat. Variabel DAK menunjukkan hubungan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi yang mana berbanding terbalik dengan tujuan pemberian DAK yang ditujukan untuk pembangunan sarana dan prasarana serta infrastruktur yang menunjang laju pertumbuhan ekonomi regional.

Berdasarkan analisis hasil uji yang telah dibahas dapat disimpulkan bahwa secara umum APBD Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan telah berhasil menjalankan perannya sebagai penggerak perekonomian regional meskipun terdapat beberapa kekurangan. Kekurangan yang ditunjukkan pada hasil pengujian dapat dimungkinkan terjadi apabila pengelolaan anggaran yang selama ini dilaksanakan kurang efisien dan kurang terencana dengan baik sehingga realisasi anggaran kurang tepat sasaran. Selain itu, dimungkinkan juga bahwa variabel-variabel tersebut memang tidak secara langsung memengaruhi pertumbuhan ekonomi regional.

### **Saran**

Sebagai upaya peningkatan fungsi APBD sebagai stimulan perekonomian regional perlu adanya peningkatan pengelolaan APBD oleh pemerintah daerah sehingga realisasi anggaran dan kegiatan yang dilaksanakan dapat menjadi lebih efisien dan tepat sasaran.

Penelitian ini tidak terlepas dari berbagai keterbatasan yang sangat mungkin diperbaiki oleh peneliti selanjutnya. Penelitian ini hanya menggunakan beberapa komponen dalam APBD sehingga masih banyak ruang perbaikan bagi penelitian selanjutnya untuk melakukan penelitian secara lebih kompleks menggunakan variabel-variabel yang belum diuji dalam penelitian ini.



## DAFTAR PUSTAKA

- Allysa Sabrina, F., Vidya Nandita, W., Dewi Maharani, D., Studi Manajemen, P., & Ekonomi Bisnis, F. (2023). Uji Asumsi Klasik untuk Menghindari Pelanggaran Asumsi Klasik pada Regresi Linier Ordinary Least Squares (OLS) dalam Ekonometrika. *Jurnal Ilmiah Manajemen Ekonomi Dan Akuntansi*, 1(1), 195–203. <https://doi.org/10.62017/jimea>
- Anggita, R., & Sari, L. K. (2021). Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Investasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2019. *Seminar Nasional Official Statistics*, 2021(1), 641–650. <https://doi.org/10.34123/semnasoffstat.v2021i1.991>
- BPS Indonesia. (2018, February 27). Nama Ibu Kota Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan. Kalsel.Bps.Go.Id. <https://kalsel.bps.go.id/statictable/2015/10/12/1194/nama-ibu-kota-kabupaten-kota-se-kalimantan-selatan.html>
- Chalid, P. (n.d.). Modul 1 Teori Pertumbuhan. Retrieved January 24, 2024, from <http://repository.ut.ac.id/4601/1/MAPU5102-M1.pdf>
- Deswanto, D. B., Ismail, A., & Hendarmin, H. (2017). Pengaruh Belanja Daerah Berdasarkan Klasifikasi Ekonomi terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010 - 2015. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan*, Vol. 6, 187–210.
- Dinarjito, A., & Dharmazi, A. (2020). Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Investasi, dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional di Provinsi Kalimantan Timur.
- Sinto, Zuhroh, D., & Cahyaningsih, D. S. (2023). Analisis Pengaruh Belanja Langsung, Belanja Tidak Langsung dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. 12(2). <https://journal.unigres.ac.id/index.php/GemaEkonomi/index>
- Indonesia, P. P. (2023). Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023.
- Fadilla, S. I., Zumaeroh, Z., TJ, H. K., Retnowati, D., Purnomo, S. D., Winarto, H., & Adhitya, B. (2022). Desentralisasi Fiskal dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kawasan Timur Indonesia.
- Amelia, A., & Ekobelawati, F. (2018). Efektivitas Transfer Pusat Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Buletin Studi Ekonomi* (Vol. 23, Issue 1).
- Pangestu, E. C. (2018). Belanja dan Investasi Kalimantan Selatan.
- Buana, A. L., Saragih, H. J. R., & Aritonang, S. (2018). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Investasi Pemerintah, Investasi Swasta dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Pulau Jawa Tahun 2011 - 2015.
- Ruwah Ibnatur Husnul, N., Eka Rima Prasetya, Mp., Prima Sadewa, Mp., Ajimat, Mp., Listiya Ike Purnomo, M., Jl Surya Kencana No, M., Gd, P. A., & Pamulang Tangerang Selatan -Banten, U. (2020). Statistik Deskriptif. [www.unpam.ac.id](http://www.unpam.ac.id)
- Sihombing, P. R. (2021a). Analisis Regresi Data Panel. <https://www.researchgate.net/publication/357051571>
- Sihombing, P. R. (2021b). Corat Coret Catatan Statistisi Pemula. Penerbit Yayasan Sahabat Alam Rafflesia.
- Zulfikar, R. (2019). Estimation Model and Selection Method of Panel Data Regression: An Overview of Common Effect, Fixed Effect, and Random Effect Model.